



LAPORAN MONITORING EVALUASI RENCANA AKSI TRIWULAN III



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025**

LAPORAN MONITORING RENCANA AKSI

I. Pendahuluan

Pemerintahan yang akuntabel merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, aspirasi dan cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

Monitoring dan evaluasi dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah Evaluasi Rencana Aksi Kinerja untuk memantau setiap perubahan dan perbaikan atas rencana aksi pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian Kinerja (PK) sehingga dapat mendeteksi secara lebih dini tentang hasil capaian kinerja secara berkala, faktor penghambat serta faktor pendukung sehingga dapat ditemukan upaya-upaya perbaikan sehingga capaian kinerja dapat dicapai lebih optimal

Rencana aksi merupakan dokumen yang mencantumkan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan tertentu . Rencana aksi menguraikan tujuan menjadi langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti dan mudah diikuti.

II. Maksud dan tujuan

Maksud Monitoring rencana aksi adalah untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja selama satu tahun

Adapun tujuan dilakukannya monitoring rencana aksi sebagai sebagai berikut:

1. Mengetahui realisasi sasaran strategis, program, kegiatan, dan sub kegiatan
2. Mengetahui kendala dan masalah dalam pelaksanaan program
3. Mengukur dan menilai tingkat keberhasilan pencapaian target kinerja
4. Mengendalikan proses pencapaian target kinerja
5. Memberikan umpan balik untuk perbaikan kinerja
6. Mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi
7. Mewujudkan transparansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
8. Monev merupakan salah satu bentuk pengendalian yang dilakukan untuk memastikan bahwa rencana aksi berjalan sesuai dengan target dan anggaran yang telah ditetapkan

III. Rencana Aksi

Rencana Aksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 yang dituangkan secara berkala Adapun Rencana Aksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung Tahun 2025 seperti tabel berikut ini :

Berdasarkan tabel 1 diatas bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendukung Misi 1 yaitu Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan dengan tujuan Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi.

Untuk mencapai tujuan tersebut dinas kependudukan dan pencatatan sipil memiliki 3 sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja yaitu:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja

Indikator kinerja :

a. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Rencana aksi :

- Mengadakan rapat evaluasi kinerja tahun sebelumnya
- Membuat SK Tim Evaluasi AKIP
- Membuat rencana aksi
- Membuat laporan LKj, LPPD, LKPJ, Laporan Evaluasi Renja, laporan fisik keuangan
- Mengadakan rapat dan monitoring evaluasi kinerja
- Membuat laporan monitoring rencana aksi setiap triwulan

2. Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik

a. Indeks Kepuasan Masyarakat

Rencana Aksi :

- Mengadakan rapat perencanaan kinerja
- Membuat SK Tim Survei Kepuasan Masyarakat
- Membuat rencana aksi
- Melakukan survei kepuasan masyarakat dengan menyebarkan kuesioner
- Pengolahan data dan analisis

- Penyusunan dan membuat laporan kepuasan masyarakat
- Melakukan rapat monitoring dan evaluasi kinerja survei kepuasan masyarakat
- Melakukan tindaklanjut atas pengaduan masyarakat

b. Cakupan Layanan Adminduk dan Capil

Rencana Aksi :

- Mengadakan rapat evaluasi kinerja tahun sebelumnya
- Membuat rencana aksi
- Melakukan perekaman KTP ke sekolah-sekolah dan daerah terpencil
- Melakukan pelayanan penerbitan KK, KTP Kia dan penduduk rentan
- Melakukan monitoring pelayanan ke kantor unit layanan di kecamatan
- Melakukan Bimbingan Teknis
- Melakukan rapat monitoring evaluasi kinerja
- Melakukan monitoring rencana aksi
- Melaksanakan pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil atas hasil laporan peristiwa penting kependudukan
- Melaksanakan koordinasi ke lembaga mitra kerjasama tentang pelaksanaan layanan inovasi
- Melaksanakan konsultasi teknis kegaitan ke Dinas Dukcapil Provinsi
- Pengelolaan SIAK/Buku Data Agregat Kependudukan
- Pengelolaan SIAK/Buku Profil Kependudukan
- Pemeliharaan sarana pegolah data
- Pemeliharaan jaringan komunikasi data

3. Meningkatkan kualitas inovasi daerah

Indikator kinerja :

a. Nilai Inovasi Perangkat Daerah

Rencana Aksi :

- Membuat SK Inovasi
- Mengikuti Rapat sosialisasi Aplikasi IGA
- Mengentrikan Inovasi ke Aplikasi IGA

IV. Hasil Monitoring Rencana Aksi

Untuk mencapai misi dan tujuan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 3 sasaran kinerja dengan empat indikator kinerja. Adapun realisasi dari ke empat indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini :

Tabel 2
Realisasi Kinerja

VISI : MEWUJUDKAN PESIRIS SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL																											
MISI 1 : Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan																											
TUJUAN : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi																											
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target IKU				Realisasi Kinerja				Program/Kegiatan	Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/(Output)	Satuan	Target	Anggaran	RENCANA AKSI	REALISASI			PENANGGUNG JAWAB						
			TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV								TW I	TW II	TW III							
1	2	3	4								5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	1.1 Nilai AKIP Perangkat Daerah	A (90)				84,38				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	peren	100	39.792.950											Sekretariat Dinas Dukcapil
										Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	dokumen	8	39.792.950	Mengadakan rapat evaluasi kinerja tahun sebelumnya											
																Membuat SK Tim Evaluasi AKIP											
																Membuat rencana aksi											
																Membuat laporan LKJ, LPPD, LKPJ, Laporan Evaluasi Renja, laporan fisik keuangan											
																Mengadakan rapat dan monitoring evaluasi kinerja											
																Membuat laporan monitoring rencana aksi setiap triwulan											
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	2.1 Indeks kepuasan Masyarakat		92				91,83	92																		
																Mengadakan rapat perencanaan kinerja											
																Membuat SK Tim Survei Kepuasan Masyarakat											
																Membuat rencana aksi											
																Melakukan survei kepuasan masyarakat dengan menyebarkan kuesioner											
																Pengolahan data dan analisis											
																Penyusunan dan membuat laporan kepuasan masyarakat											
																Melakukan rapat monitoring dan evaluasi kinerja survei kepuasan masyarakat											
																Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat											

Berdasarkan tabel 2 diatas bahwa program kegiatan sudah dilakukan untuk kegiatan bimbingan teknis tidak jadi dilakukan karena efesiensi anggaran

Untuk capaian kinerja nilai AKIP perangkat daerah teralisasi sebesar 84,38, masih rendah dari target kinerja sebesar 80 masih rendah dari target kinerja sebesar 90, untuk indikator kinerja indek kepuasan masyarakat sudah dilakukan pada sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada semester pertama dengan hasil 91,83 dan pada semester 2 (dua) dengan hasil 92 dengan demikian capaian kinerja unntuk indikator kinerja Indek Kepuasan Masyarakat tercapai 100%. Untuk indikator kinerja cakupan layanan adminduk dan capail pada triwuan 3 (tiga) teralisasi sebesar 91,97 sementara untuk nilai kematanga inovasi terealsiasi sebesar 79.

V. Faktor keberhasilan/kegagalan

1. Nilai AKIP Perangkat Daerah sudah dilakukan rapat perencanaan dan evaluasi kinerja setiap awal tahun dan setiap triwulannya.
2. Faktor yang menunjang keberhasilan indikator Indek kepuasan masyarakat yaitu dilakukannya perbaikan kualitas layanan administrasi kependudukan yaitu dengan aktifnya layanan pengaduan masyarakat baik melalui media sosial maupun secara offline.
3. Faktor yang menunjang belum tercapainya cakupan layanan adminduk disebabkan masih adanya penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman KTP el dan masih banyak anak usia 0-17 tahun kurang satu ahri yang belum memiliki KIA.
4. Faktor yang menunjang belum tercapainya indikator kinerja nilai kematangan inovasi disebabkan kecepatan penciptaan inovasi. Pada hasil laporan invoasi daerah bukti dukung belum ada dan kualitas inovasi daerah juga tidak ada bukti dukungnya.

VI. PENUTUP

Dari hasil monitoring terhadap Rencana Aksi indikator kinerja perlu dilakukan rapat evaluasi kinerja dengan semua pegawai, sehingga target indikator kinerja dapat tercapai pada akhir tahun.

Painan, 6 Oktober 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pesisir Selatan



BERISKHAN, S.Sos.M.Si
NIP. 19720302 199302 1 001